

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aidit, D.N., 1952, *Sejarah Gerakan Buruh di Indonesia*, Yayasan Pembaruan, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*, Prenadamedia, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Eddyono, Supriyadi Widodo & Ahmad Sofian, 2016, “*Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Rancangan KUHP (Parliamentary Brief: Series #2)*”, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan.
- Efendi, Jonaedi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Depok.
- Gosita, Arif, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Garner (Ed), Bryan A., 2009, *Black’s Law Dictionary Deluxe Ninth Edition*, West Publishing Co, St. Pauli.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haryono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Hiariej, Edward O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- _____, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Hidayah, Anis, Wahyu Susilo, Mulyadi, 2015, “*Seluruh Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*”, Migrant Care, Jakarta
- Kawar, Mary., 2004, *Gender and Migration: Why are Women more Vulnerable? femmes en mouvement: genre, migrations et nouvelle division international du travail*. Graduate Publications, Geneva
- Khusnaeny, Asmaul dkk, 2018, *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)*, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Marlina & Azmiati Zuliah, 2015, “*Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Nuraeny, Henny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI “Data Penempatan dan Perlindungan PMI” Periode Bulan Juni Tahun 2019, *Laporan*, Juli 2019
- Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Schaffmeister, Keijzer, N., Sutorius. E.PH., Diterjemahkan oleh Sahetapy, J.E., 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Shidarta dkk, 2014, *Kualitas Hakim dalam Putusan (Laporan Penelitian Putusan Hakim Tahun 2012)*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Sinlaeloe, Paul, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wisnuwardhani, Savitri, dkk, 2018, *Buku Saku Memahami Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Kelebihan dan Kelemahan UU PPMI*, Jaringan Buruh Migran a/n The Institute for Ecosoc Rights, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wolhuter, Lorraine Neil Denham, 2009, David Olley, *Victimology: Victimisation and Victims Right*, Routledge-Cavendish, London.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141.

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Buku I Agenda Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Per 15 September 2019

C. Karya Ilmiah dan Jurnal

Arief, Barda Nawawi, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas,

<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pembaharuan-sistem->

[penegakan-hukum-dengan-pendekatan-religius-dalam-konteks-siskumnas-dan-bangkumnas/](#), diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

- Carumna I, Gaza , 2018, Jenis Putusan Pengadilan Dalam Mengaplikasikan Asas Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) di KUHAP Pada Masa Mendatang, *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Ibrahim, Aji Lukman, 2017, Analisis Disparitas Tuntutan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum UGM.
- Mishin, Dmitri, The Saqaliba Slaves in The Aghlabid State, <http://www.columbia.edu/itc/history/conant/mushin1998.pdf> , diakses pada 1 November 2018.
- Nuryani, Yani, 2012, ”Pencegahan Kejahatan Perdagangan Orang Secara Terpadu (Studi Tentang Efektivitas Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO)” *Tesis*, Program Magister Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Pandia, Rina Agustina, 2009, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Konsentrasi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Indonesia.

- Rachman, Hanafi ,2012, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Tesis*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Seftiniara, Intan Nurina., “Disparitas Pemidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 8 Nomor 2 September,2017
- Sudirman Sitepu, “Penanggulangan Kejahatan Melalui Kebijakan Kriminal”, *Syiar Madani*, Vol. VIII, No.3, November, 2006,
- Sholechah, Wiwit, 2011, Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Tahir, Heri ,2002, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- The World Bank Indonesia Report, “Indonesia’s Global Worker: Juggling Opportunities and Risks”
<http://pubdocs.worldbank.org/en/357131511778676366/Indonesias-Global-Workers-Juggling-Opportunities-Risks.pdf> diakses pada tanggal 29 Agustus 2018
- U.S. Department of State, Trafficking In Persons Report June 2019
- Wibisono, Andreas, 2009, Penilaian Jdex Jurist Terhadap Putusan Bebas Murni Yang Dimohonkan Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus: Korupsi Terdakwa ECW, Neloe, Nurdin Halid dan Fadhillah Budiono), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

D. Internet

Akbar, Aprilio., “Tindak Pidana Perdagangan Orang di NTT Disorot AICHR”,

<https://bali.bisnis.com/read/20181011/537/848054/tindak-pidana-perdagangan-orang-di-ntt-disorot-aichr>, diakses tanggal 13 Juli 2019.

Dony, Bartasius “10 Tersangka TPPO Berkedok Umrah Terancam Bui Hingga 15

Tahun”, <https://news.detik.com/berita/d-3503839/10-tersangka-tpo-berkedok-umrah-terancam-bui-hingga-15-tahun>, diakses tanggal 13 Juli 2019.

Fardianto, Fariz, Terjerat *Human Trafficking*, bos PT.SSS justru melenggang bebas,

<https://metrojateng.com/terjerat-human-trafficking-bos-pt-sss-justru-melenggang-bebas/> Diakses pada 9 Desember 2018

Halim, Devina, Sekitar 1.200 orang Menjadi Korban Perdagangan Orang ke Suriah, Maroko, Arab Saudi dan Turki.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/09/18422761/sekitar-1200-orang-jadi-korban-perdagangan-orang-ke-maroko-suriah-arab-saudi>

Himas Puspito Putra, Sepanjang Januari, 13 Pekerja Migran asal NTT Meninggal

Dunia. <https://www.inews.id/daerah/regional/sepanjang-januari-13-pekerja-migran-asal-ntt-meninggal-dunia>.

Lestari, Fitri., “Refleksi Kasus TPPO PT. Sofia Sukses Sejati (1): Lulusan SMK Jadi

Korban Perdagangan Manusia”, <http://www.migrantcare.net/2018/04/refleksi-kasus-tindak-pidana-perdagangan-orang-pt-sofia-sukses-sejati/>, diakses tanggal 13 Juli 2019.

Tribunnews, “Direktur Utama PT Sofia Sukses Sejahtera Didakwa Tindak Pidana

Perdagangan Orang”,

<https://www.tribunnews.com/regional/2018/02/08/direktur-utama-pt-sofia-sukses-sejati-didakwa-tindak-pidana-perdagangan-orang>, diakses tanggal 13

Juli 2019.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 613K/Pid.sus/2018

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 114/Pid.Sus/2018/PT.KPG

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 49/Pid.Sus/2018/PN.Smg